


**RENCANA AKSI ATAS PELAKSANAAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TARGET				STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			BIDANG PELAKSANA
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan	1. Persentase pelayanan sesuai SOP  2. Skor SKM	pelayanan sesuai SOP / pelayanan belum sesuai SOP x 100%  Analisis bobot nilai SKM	%  Angka	100  0	100  0	100  0	100  78	- Menyediakan jasa administrasi perkantoran - Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur - Melaksanakan evaluasi capaian kinerja dan keuangan - Melaksanakan survey kepuasan masyarakat	Administrasi Perkantoran	1. Penyelenggaraan administrasi perkantoran 2. Ikhtisar Laporan Kinerja dan Keuangan 3. Survey SKM	Sekretariat
2.	1. Tata kelola keuangan 2. Tata kelola asset 3. Tata kelola pelayanan 4. Tata kelola Pemerintahan	Dokumen administrasi pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan	Angka	14	14	14	14	Melaksanakan pembinaan administrasi desa/kelurahan secara berkala	Administrasi Perkantoran	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kasubag PEP Seksi PMD dan Seksi Pemerintahan

CAMAT CAMAT

  
**YTUDO WAHYONO, S.Sos, M.Si**

Pembina

NIP. 19670606 198803 1 011

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	SEBELUM IREVIU					SETELAH REVIU						
				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2013	2016	2017	2018	2019		2013	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Persentase pelayanan sesuai SOP	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan	Persentase pelayanan sesuai SOP	100	100	100	100	100	Persentase pelayanan sesuai SOP	100	100	100	100	100
		2. Skor SKM		Skor SKM	74.00	74.00	74,00	74,2	78,83	Skor SKM	74.00	74.00	74,00	74,2	78,83
2	Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi SKPD Kecamatan, desa dan kelurahan	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan	1. Tata kelola keuangan 2. Tata kelola asset 3. Tata kelola pelayanan 4. Tata Kelola pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan	14	14	14	14	14	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan	14	14	14	14	14